

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah (Hasibuan, 2015).

Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintah. Terdapat pihak yang berkepentingan dengan standar akuntansi pemerintahan antara pengguna laporan keuangan, auditor, masyarakat pengguna laporan keuangan, organisasi profesi akuntansi, akademisi dan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan.

Maraknya penggunaan akuntansi akrual pada organisasi sektor publik antara lain disebabkan karena adanya tekanan reformasi akuntansi sektor publik yang mendorong dilakukannya pengelolaan keuangan publik

secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu juga terdapat tekanan dari lembaga-lembaga internasional seperti *World Bank*, UNDP, IMF, dan adanya standar akuntansi sektor publik internasional (IPSAS) yang mendorong penggunaan akuntansi akrual untuk organisasi sektor publik (Mahmudi, 2011:135).

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diganti dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Dengan penerapan PP No.71 Tahun 2010, maka penerapan akuntansi berbasis akrual telah memiliki kekuatan hukum.

Akuntansi berbasis akrual dianggap dapat memberikan informasi yang lebih berguna untuk pengambilan keputusan dibandingkan akuntansi berbasis kas (Tickell & Geoffrey, 2010 dalam Hasibuan dan Muda, 2013). Serta dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif, yaitu transaksi tercatat pada periode tercatat yang dapat dipertanggung jawabkan. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi prasyarat yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, apabila laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, maka laporan keuangan tersebut menjadi kurang berkualitas. Laporan keuangan yang andal apabila informasi yang dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan materiel, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan, apabila informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan pada entitas lain. Dapat dipahami, apabila informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan dalam istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Penerapan basis akrual pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan daerah berupa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yakni Laporan realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Neraca

adalah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan Arus Kas (LAK) adalah pemberian informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama satu periode. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka selain kemampuan menerapkan aturan-aturan baik undang-undang maupun peraturan pemerintah ataupun peraturan lainnya diperlukannya kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi (Putra, 2015) dan komitmen organisasi (Hasibuan, 2015) agar laporan keuangan dapat disampaikan kepada publik dengan tepat waktu dan juga pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk menghasilkan

akuntabilitas yang lebih besar atas setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyediaan layanan publik kepada masyarakat yang maksimal.

Sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia dalam satu organisasi dan untuk mencapai tujuan organisasi yang meliputi latar belakang pendidikan yang diperoleh responden pemahaman tentang tugasnya, kesiapan, dalam melakukan perubahan dalam proses penyusunan laporan keuangan (Azhar, 2007 dalam Alfian, 2014). Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Alfian (2014) menunjukkan hasil sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual berdasarkan standar akauntansi pemerintah. Putra dan Ariyanto (2015) hasil penelitian bahwa kualitas sumber daya berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

Teknologi informasi yang lebih maju mungkin lebih dapat menerapkan sistem akuntansi manajemen baru daripada organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah (Krumwiede, 1998 dalam Kusuma, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2015) dan membuktikan bahwa kualitas teknologi informasi berpengaruh negatif dan terbukti berpengaruh signifikan secara statistik, hal ini tidak selajalan dengan penelitian Kusuma

(2013) yang menunjukkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.

Komitmen organisasi sering diartikan sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi (Luthans, 2006:249 dalam Hasibuan, 2015). Komitmen organisasi sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi (Robbins dan Judge, 2009). Adanya komitmen organisasi membuat sikap pegawai menunjukkan kepedulian dan kesetiaan yang tinggi pada organisasi.

Selain itu diperlukan komunikasi yang berkesinambungan dari pemerintah pusat maupun daerah. meyakini bahwa komunikasi merupakan kekuatan pembentuk utama organisasi (Bernard,1983; Luthans 2006:370 dalam Hasibuan, 2015). Bernard menempatkan komunikasi sebagai tujuan dan keinginan untuk bertindak, sebagai salah satu dari elemen organisasi. Penelitian yang dilakukan Putra (2015) menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2015) membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Penelitian mengenai SAP berbasis akrual dilakukan oleh Hasibuan dan Muda (2013). dimana penelitian tersebut menganalisis penerapan penuh PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Medan dimana menunjukkan hasil bahwa variabel sumber daya manusia dan resistensi terhadap perubahan berpengaruh positif, tetapi tidak terbukti signifikan, variabel komitmen organisasi dan dukungan konsultan berpengaruh positif dan terbukti berpengaruh signifikan secara statistik, serta variabel komunikasi dan kualitas teknologi informasi berpengaruh negatif dan terbukti signifikan secara statistik

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dan dikembangkan kembali oleh peneliti yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Ariyanto (2015) di Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Bali. Peneliti mengganti variabel gaya kepemimpinan dengan variabel pemanfaatan teknologi informasi.

Sehingga penelitian ini diberi judul : **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali)”**.

B. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual?
4. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap penerapan SAP berbasis akrual.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh komunikasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hal penting dari penelitian adalah manfaat yang diperoleh atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama berada di bangku perkuliahan.

2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah kabupaten boyolali.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintahan yang akan menggunakan SAP berbasis akrual.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1 : PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, pengembanagn hipotesis dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukuran serta model analisis.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas deskripsi obyek penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Penutup terdiri atas simpulan, saran dan keterbatasan penulis mengenai penelitian yang dilakukan.